

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Wilayah Perairan mempunyai makna strategis serta krusial bagi keberlangsungan masa depan Indonesia mengingat bahwa Indonesia merupakan negara Kepulauan (*Archipelagic State*), di mana kawasan tersebut mendominasi total keseluruhan kawasan Indonesia.¹ Wilayah merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh suatu negara, di samping rakyat dan sistem pemerintahan. Dengan wilayah air yang jauh lebih luas dibanding daratan, sudah sewajarnya apabila Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, dan menciptakan keamanan di kawasan maritim.²

Luas kawasan teritorial Indonesia tercatat yakni 7,81 Juta Km² dengan kawasan wujud laut yang mendominasi seluas sekitar 3,25 Juta Km² dan 2,55 juta Km² merupakan Zona Ekonomi Eksklusif.³ Potensi laut yang dimiliki Indonesia tidak hanya berperan sebagai pemersatu wilayah dan bangsa Indonesia, melainkan juga memiliki peran sebagai penggerak sektor ekonomi melalui jalur perdagangan. Berdasarkan letak geografis kepulauan Indonesia berada di posisi silang (*crossroad*) antara benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik yang menjadikan wilayah perairan Indonesia sebagai *Sea line of Trade and Sea line of Communication* sehingga selalu dilewati kapal-kapal dagang dari berbagai negara.

Kondisi geografis Indonesia yang strategis di satu sisi sangat menguntungkan untuk lalu lintas barang, jasa dan masyarakat dalam kegiatan perekonomian atau perdagangan internasional, namun di sisi lain berpotensi timbulnya berbagai bentuk tindak kejahatan tradisional dan non-konvensional, yang terorganisasi secara nasional dan internasional seperti *illegal logging*, *illegal mining*, *illegal fishing* dan *human trafficking*. Berbagai ancaman tersebut tentunya berpotensi mengganggu keamanan dan kepentingan nasional, bahkan keamanan kawasan dan global.⁴

¹TridoyoKusumastanto, 2012, *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut*, Jakarta.

² Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, 2017, *KebijakanKelautan Indonesia*.

³ Oki Pratama, Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia, diakses di <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia-pada-tanggal-23-03-2023> pukul 12.25 WIB.

⁴ Kementerian Luar Negeri, 2016, *DIPLOMASI POROS MARITIM: KEAMANAN MARITIM DALAM PERSPEKTIF POLITIK LUAR NEGERI*.

Seperti misalnya, ancaman *illegal fishing* kerap kali menghantui perairan Indonesia. Kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia bukanlah sebuah fenomena baru. Ikan yang ada di perairan Indonesia diambil oleh kapal-kapal asing, yang mana ini berdampak kepada kesejahteraan para nelayan di Indonesia. Penyebab terjadinya *illegal fishing* ini disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, terbatasnya tenaga polisi perikanan, serta kemampuan nelayan Indonesia yang belum maksimal untuk memanfaatkan potensi perairan di Indonesia. Luasnya perairan Indonesia dan terbatasnya tenaga polisi perikanan membuat *illegal fishing* di Indonesia terjadi dengan begitu saja, yang mana pada akhirnya ini hanya akan merugikan negara, selain itu juga menjadi ancaman karena banyak kapal asing tersebut telah menuju kawasan kedaulatan Indonesia dengan secara tidak resmi.⁵

Tindakan *illegal fishing* yang dihadapi oleh Indonesia ini memberikan kerugian yang sangat besar secara materiil. Kerugian ini sendiri beragam jumlah nominalnya. Pada 2014, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwasanya nilai kerugian yang diterima oleh Indonesia akibat maraknya *illegal fishing* diperkirakan sekitar 101 triliun rupiah di setiap tahunnya. KKP pun berupaya untuk melakukan tindakan untuk mencegah lebih besarnya kerugian yang diterima oleh Indonesia di dalam tindakan *illegal fishing* ini sekaligus berusaha untuk meminimalisirnya.⁶ Namun nyatanya kerugian yang dialami oleh Indonesia berkurang, namun masih sangat merugikan perekonomian Indonesia. Menurut KKP, kerugian yang diderita oleh Indonesia akibat penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan bisa mencapai Rp 45 triliun. Selain itu juga dengan adanya IUU Fishing, maka akan mengancam kelestarian sumber daya ikan (SDI) dan ekosistem perairan, di mana ini akan berdampak kepada kecilnya peluang nelayan Indonesia dalam mendapatkan ikan hasil tangkapan.⁷ *Illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia ini termasuk di dalam ancaman keamanan maritim yang mana terjadi di Indonesia.

Maraknya ancaman keamanan maritim yang mana sifatnya lintas batas membutuhkan kerja sama internasional guna menanggulangnya. Sebagai identitas politik luar negeri Indonesia, prinsip bebas aktif telah ditanamkan dalam Pasal 3 UU No. 37/1999 terkait Hubungan Luar Negeri, yang menegaskan bahwasanya “Politik luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk

⁵Desi Yunitasari, 2020, *Penegakan Hukum di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of The Sea 1982*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 8, No. 1.

⁶Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2019, *Upaya Mengungkap Ruang Gerak Illegal Fishing di Indonesia*, di aksesdari https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/954/* pada 19 Juni 2023.

⁷Irawan Kelana, 2020, *IUU Fishing Rugikan Indonesia Rp 45 Triliun Per Tahun*, di aksesdari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qge6lm374/iuu-fishing-rugikan-indonesia-rp-45-triliun-per-tahun> pada 19 Juni 2023.

Kepentingan Nasional.” Prinsip bebas aktif dari politik luar negeri Indonesia ini tetap relevan dengan situasi internasional saat ini.⁸ Maka dari itu, di dalam melindungi sumber kekayaan kelautan Indonesia, selain mengupayakannya secara mandiri, Indonesia memutuskan untuk menjalin kerja sama bersama negara lain maka bisa memaksimalkan meminimalisir kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia.

Pada umumnya, kerja sama maritim di lingkup Internasional, terbagi menjadi dua kelompok yakni, Kerja sama Bilateral dan Kerja sama Multilateral (Regional). Kerja sama Bilateral merupakan Kerja sama yang melibatkan dua belah pihak atau negara sebagai aktor. Sedangkan Kerja sama multilateral melibatkan dua negara atau lebih, dan pada umumnya Kerja sama Multilateral lebih terorganisir ke dalam suatu kawasan (Regional). Wujud kerja sama regional pada sektor keamanan maritim merujuk pada problematika yang mana berdampak signifikan serta dijadikan atensi pada kawasan tersebut. Implementasi keamanan maritim di kawasan tersebut tentu menegaskan terwujudnya pemeliharaan keamanan maritim nasional.

Salah satu mitra terpenting bagi Indonesia dalam politik global adalah Tiongkok. Dalam rangka untuk menjalin kerja sama, suatu negara perlu memiliki persepsi yang sama atau sejalan dengan lain sehingga kerja sama tersebut bisa memaksimalkan produktivitas. Indonesia menilai Tiongkok sebagai mitra yang strategis dan memiliki pandangan dan kepentingan yang sama terkait wilayah lautan. Secara geografis, Tiongkok merupakan negara yang wilayahnya didominasi oleh daratan, namun sejarah kemaritiman negara ini tidak dapat dikesampingkan.⁹

Kerja sama maritim antara Indonesia dan Tiongkok pun terbagi menjadi dua, yakni kerja sama bilateral dan kerja sama multilateral. Untuk kerja sama bilateral, kerja sama Indonesia dan Tiongkok dilakukan melalui Komite Kerja sama Maritim (KKM). KKM ini sendiri berkaitan dengan pertahanan dan keamanan maritim.¹⁰ Dalam kerja sama regional, Indonesia dan Tiongkok terlibat di dalam ASEAN Regional Forum (ARF) yang secara umum membahas mengenai stabilitas keamanan, termasuk di dalamnya keamanan maritim. Dalam kerja sama multilateral sendiri terdapat International Maritime Organization (IMO) di mana ini merupakan badan khusus PBB yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan di wilayah maritim.¹¹

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Maritim, 2019, *Buku Putih Diplomasi Maritim*, (Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 128 Tahun 2019 tentang Buku Putih Diplomasi Maritim).

⁹Angga Nurdin Rachmat, 2018, *Konstruksi Identitas dalam Kepentingan Maritim Tiongkok terkait Peningkatan Kekuatan People Liberation Army Navy (PLA Navy)*, Cimahi, Universitas Jenderal Achmad Yani.

¹⁰Risky Amalia, 2018, *Kerja Sama Maritim Indonesia – Tiongkok Menuju Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, *Jurna Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 3, hal. 1271-1280.

¹¹Ibid.

Pada umumnya, kepentingan Tiongkok atas wilayah maritim, terbagi menjadi dua, yakni *Maritime Economic* dan *Security*. Dalam sektor ekonomi, mayoritas perdagangan luar negeri Tiongkok sebanyak 90 persen dilakukan melalui jalur perairan. Munculnya Tiongkok sebagai kekuatan global, juga menaikkan posisi tawar Tiongkok dalam politik global untuk menjalin kerja sama di skala bilateral bahkan multilateral. Terjalannya hubungan kerja sama Indonesia Tiongkok dalam bidang maritim, semakin diperkuat yang diimplementasikan dengan kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Luhut Binsar Pandjaitan ke Guiyang, Tiongkok pada 5 Juni 2021. Pertemuan ini membahas seputar penguatan kerja sama maritim dan pembentukan *High-level Dialogue Cooperation Mechanism* serta berhasilnya penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)* tentang penguatan kerja sama Maritim oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Tiongkok (*State Councilor*), yaitu Wang Yi.

Jika merujuk kepada MoU *Strengthening Maritime Cooperation* antara Tiongkok dan Indonesia, maka MoU ini merupakan MoU yang berdiri sendiri dan sebagai pendalaman kerja sama yang sudah terjadi sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak adanya konektivitas atau keterkaitan pelaksanaan di dalam MoU SMC ini dengan MoU lainnya yang telah disepakati oleh Tiongkok dan Indonesia selain sebagai jalan untuk memperdalam kerja sama maritim dalam lingkup bilateral. SMC ini membawahi pembahasan kerja sama pertahanan, politik, keamanan, dan ekonomi, termasuk *IUU Fishing (illegal, unreported, and unregulated)*, kerja sama akuakultur (budi daya perikanan), pengolahan hasil perikanan, *cold storage*, dan pemasaran, serta kerja sama transfer teknologi dan pengetahuan.¹²

Jika merujuk kepada MoU yang telah ditandatangani oleh Indonesia dan Tiongkok, terdapat kerja sama di dalam budi daya perikanan. Potensi budi daya perikanan di Indonesia begitu besar tetapi tak bisa maksimal dan tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini disebabkan oleh persoalan teknologi yang menjadi kendala di Indonesia. Kini budidaya perikanan turut andil meraih 6% atas seluruh tital produksi perikanan meraih 100 juta ton per tahun. Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia ini membuat Indonesia jauh tertinggal dibandingkan negara lain, misalnya Tiongkok. Maka dari itu dalam SMC ini, Indonesia dan Tiongkok juga akan berkomitmen di dalam meningkatkan budi daya perikanan Indonesia.¹³

¹²Antara News, 2022, *Minister hopes cooperation with China to boost Indonesia's maritime and fisheries*, di akses dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/336837/minister-hopes-cooperation-with-china-to-boost-indonesias-maritime-and-fisheries> pada 11 Juni 2023.

¹³Anisa Indraini, 2021, *Produksi Budi Daya Perikanan RI Masih Keokdari China, Ini penyebabnya*, di akses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5639277/produksi-budi-daya-perikanan-ri-masih-keok-dari-china-ini-penyebabnya> pada 20 Juni 2023.

Persoalan maritim, terutama terkait dengan persoalan penangkapan ikan ilegal, merupakan sebuah persoalan yang rumit karena menyangkut dengan wilayah suatu negara. Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan menyadari betapa sulitnya serta tingginya ancaman yang dihasilkan dari persoalan maritim ini, hingga kemudian, Indonesia memutuskan untuk melakukan kerja sama terkait dengan persoalan maritim ini.

Adapun penelitian ini menjadi penting karena peneliti melihat berdasarkan data-data yang telah dijabarkan oleh penulis terkait dengan ancaman maritim yang dialami oleh Indonesia terutama terkait dengan tindakan *illegal fishing* penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bekerja sama dengan Tiongkok merupakan kebijakan nasional yang dipilih oleh Indonesia dalam rangka memerangi dan meminimalisir tindakan *illegal fishing* serta memaksimalkan potensi sumber daya kelautan Indonesia, maka urgensi dari penelitian ini ialah bagaimana cara Indonesia di dalam mencapai kepentingan nasional terkait dengan melindungi sumber daya kelautan yang dimiliki oleh Indonesia. Meskipun Indonesia dan Tiongkok berada di situasi yang kurang baik terkait dengan klaim Tiongkok terhadap Kepulauan Natuna namun masih bekerja sama dengan Indonesia di dalam membantu Indonesia mencapai kepentingan nasionalnya melalui mengamankan sumber daya kelautan Indonesia.

Fokus penelitian dari masalah ini adalah kepentingan Republik Indonesia untuk melakukan penguatan kerja sama maritim dengan Republik Rakyat Tiongkok. Luasnya ancaman keamanan yang bersifat lintas batas menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mengamankan wilayah lautnya. Oleh sebab itu, fokus penelitian pada tulisan ini adalah Kepentingan Indonesia dalam penguatan kerja sama maritim dengan RRT.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, masalah yang akan diteliti adalah kepentingan Indonesia untuk melakukan penguatan kerja sama maritim dengan Republik Rakyat Tiongkok, hal tersebut menarik perhatian penulis karena mengingat bahwa semakin meningkatnya lalu lintas perdagangan di jalur laut, sejalan dengan meningkatnya ancaman keamanan di wilayah maritim. Besarnya frekuensi ancaman keamanan yang mana sifatnya lintas batas, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mengamankan wilayah lautnya. Oleh sebab itu, Indonesia bisa mengoptimalkan peluang kerja sama bersama negara mitra untuk mengatasi ancaman keamanan di kawasan maritim.

Adapun rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kepentingan Indonesia dalam memperkuat kerja sama maritim melalui *Strengthening Maritime Cooperation* dengan Republik Rakyat Tiongkok?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian yang penulis miliki yakni guna menemukan kepentingan Indonesia ketika melangsungkan *Strengthening Maritime Cooperation* bersama Republik Rakyat Tiongkok.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan dari hasil penelitian atau penulisan skripsi ini adalah sebagai sebuah rujukan untuk penggiat pembangunan pengetahuan Ilmu Hubungan Internasional, dan juga peneliti selanjutnya atau mahasiswa dapat menjadikan skripsi ini sebagai sumber referensi ketika ingin melakukan kajian serupa terkait kepentingan nasional dalam kerja sama yang terjalin di antara dua negara, khususnya di dalam bidang maritim antara Indonesia dan juga Republik Rakyat Tiongkok.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian dalam skripsi ini adalah dapat memberikan kontribusi, pengetahuan, dan pemahaman terkait penguatan keamanan maritim dalam kerja sama yang dilakukan Indonesia melalui *Strengthening Maritime Cooperation* dengan Republik Rakyat Tiongkok. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Luar Negeri untuk menentukan arah kerja sama dan kebijakannya terutama dalam bidang keamanan maritim. Manfaat lainnya yaitu bagi peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai sumber acuan referensi maupun bahan komperhensif saat melakukan penelitian yangmana memiliki relevansi.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa rujukan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sebagai acuan penulisan yang membantu proses penyelesaian penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut.

Reza Fahlevi Al Ayubi, dari Universitas Muhammadiyah Malang, menuliskan sebuah penelitian yang berjudul **“Kepentingan Indonesia dalam Kerja Sama Maritim Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF) dengan**

Jepang".¹⁴ Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode eksplanatif dan menggunakan konsep kerja sama internasional dan kepentingan nasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Indonesia merupakan negara maritim dan Indonesia di era Presiden Joko Widodo mempunyai visi pemerintahan, yakni menjadi Poros Maritim Dunia. Dalam mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan melakukan kerja sama maritim dengan Jepang. Alasan Indonesia menjalin kerja sama dengan Jepang karena merupakan negara maritim dan sebagai salah satu cara untuk mempererat persahabatan kedua negara yang sudah lama terjalin, dan kerja sama ini merupakan yang pertama kali dilakukan kedua negara di bidang maritim. Dalam perkembangannya, Indonesia serta Jepang berkoalisi melangsungkan kerja sama maritim melalui penandatanganan Nota Kerja sama pembentukan Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF).

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas terkait dengan kepentingan RI di dalam kerja sama maritim. Yang membedakan hanyalah aktor yang terlibat, jika di dalam penelitian penulis, penulis membahas mengenai penguatan kerja sama maritim Indonesia dengan RRT, maka di tulisan Reza, ia membahas terkait dengan kepentingan Indonesia di dalam kerja sama dengan IJMF. Pada dasarnya, kedua tulisan ini sama-sama akan membahas mengenai kepentingan Indonesia dalam melakukan kerja sama maritim, hanya saja aktornya yang membedakan pembahasan yang ada, serta periodisasi dari penelitian. Sehingga relevansi yang mana dapat diambil adalah, melihat gambaran dari kepentingan RI terkait dengan kerja sama ini.

Selanjutnya, skripsi oleh Rahmania Kamarudin, dari Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul "**Kerja Sama Indonesia-Australia Bidang Maritim (*Maritime Cooperation*) Tahun 2017-2018.**"¹⁵ Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif dan landasan konseptual berupa konsep kerja sama internasional dan keamanan maritim. Skripsi yang ditulis oleh Rahmania Kamarudin ini membahas mengenai hubungan bilateral di antara Indonesia dan Australia. Hubungan bilateral Indonesia dengan Australia sendiri dilangsungkan pada banyak sektor, salah satunya yakni di sektor maritim. Di bidang maritim, Indonesia dengan Australia memiliki kesepakatan melangsungkan kerjasama yang mana pada masa pemerintahan Joko Widodo kesepakatan ini termaktub pada Rencana Aksi Kerja Sama Maritim. Kerja sama di sektor maritim antara Indonesia dengan Australia ini sendiri berasaskan problematika guna meraih kepentingan

¹⁴Reza Fahlevi Al Ayubi, 2019, *Kepentingan Indonesia dalam Kerja Sama Maritim Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF) dengan Jepang*, Malang, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

¹⁵Rahmania Kamarudin, 2019, *Kerja Sama Indonesia-Australia Bidang Maritim (*Maritime Cooperation*) Tahun 2017-2018*, Malang, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

bersama serta menjaga stabilitas keamanan di perbatasan laut dari kedua negara dari banyaknya ancaman kejahatan.

Relevansi penelitian berikut akan penelitian penulis adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai kerja sama (*maritime cooperation*) Indonesia dengan aktor negara lainnya. Yang membedakan adalah aktor yang menjalin kerja sama dengan Indonesia. Jika di penelitian penulis aktornya adalah Republik Rakyat Tiongkok, maka di dalam penelitian Rahmania aktornya adalah Australia. Selain itu yang membedakan juga terkait dengan periodisasi penulisan yang dipilih oleh penulis dan juga Rahmania. Namun pada dasarnya penulis dan Rahmania sama-sama membahas mengenai kerja sama Indonesia dengan aktor negara lainnya, namun penulis secara spesifik membahas mengenai kepentingan Indonesia di dalam kerja sama maritim tersebut.

Tinjauan pustaka yang selanjutnya merupakan skripsi yang ditulis oleh Amaliya Mulyano, dari Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul **“Pengaruh Kompleksitas Ancaman Keamanan Maritim Terhadap Penguatan Kebijakan Maritim Indonesia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo.”**¹⁶ Skripsi ini sendiri ditulis dengan landasan konseptual yang menggunakan konsep keamanan maritim, dan teori neo-realisme defensif. Hasil penelitian ini membahas tentang ancaman maritim Indonesia, landasan dari kebijakan keamanan maritim Indonesia serta menjelaskan masa pemerintah Joko Widodo yang memiliki alasan mengapa Indonesia memperkuat keamanan maritim Indonesia. Salah satu penyebab maraknya kejahatan maritim di Indonesia dikarenakan keberagaman dan melimpahnya sumber daya alam maritim sehingga mengundang banyak kapal penangkapan ikan asing yang melintasi batas wilayah Indonesia. Indonesia yang menggunakan instrumen militer dan kerja sama merupakan respons terhadap keberadaan ancaman tradisional dan non-tradisional pada keamanan maritim.

Relevansi penelitian tersebut dengan penelitian berikut yakni keduanya membahas mengenai penguatan pada sektor maritim. Yang membedakan adalah pertanyaan penelitian dari penelitian Amaliya dengan penelitian penulis, di mana pertanyaan penelitian Amaliya lebih berfokus untuk mencari tahu mengapa Indonesia melakukan penguatan keamanan maritim, sementara peneliti berfokus untuk membahas kepentingan Indonesia di dalam melakukan kerja sama maritim dengan Republik Rakyat Tiongkok. Namun kedua penelitian ini memiliki bidang penelitian yang sama, yakni mengenai maritim Indonesia yang menjadi fokus utama di dalam penelitian.

Tinjauan pustaka yang keempat berjudul, **“Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Tiongkok Dalam Pembangunan Infrastruktur**

¹⁶ Amaliya Mulyano, 2021, *Pengaruh Kompleksitas Ancaman Keamanan Maritim Terhadap Penguatan Kebijakan Maritim Indonesia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo*, Malang, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

Pelabuhan Era Joko Widodo,” yang ditulis oleh Selly Lidiana.¹⁷ Selly menuliskan bagaimana kepentingan nasional Indonesia yang menjadi fokus utama di dalam penelitian kerja sama yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur pada era Joko Widodo. Penelitian berikut memanfaatkan metode eksplanatif serta teknik analisa kualitatif melalui konsep kepentingan nasional dalam mendukung penjabaran hasil penelitian terkait kepentingan Indonesia perihal peningkatan pertahanan serta keamanan (*core values*), peningkatan perekonomian (*middle-range objective*), serta kepentingan perihal penjagaan keamanan juga perdamaian dunia (*long-range objective*). Fokus penelitian berikut yakni kerja sama dua negara yaitu Indonesia dan Tiongkok.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai kepentingan Indonesia di dalam menjalin kerja sama dengan Republik Rakyat Tiongkok. Yang membedakan tulisan Selly dengan tulisan penulis terletak di dalam bidang yang menjadi fokus masalah. Pada penelitian Selly, yang menjadi fokusnya adalah kerja sama untuk membangun Pelabuhan. Sementara di dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kepada kerja sama untuk meningkatkan maritim dengan Republik Rakyat Tiongkok. Namun, kedua penelitian ini memiliki bidang kajian yang sama, yakni mengkaji tentang kepentingan Indonesia di dalam melakukan kerja sama dengan Tiongkok.

Tinjauan pustaka yang kelima berjudul **“Kerja Sama Maritim Indonesia-Tiongkok Menuju Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia,”** yang ditulis oleh Risky Amalia.¹⁸ Melalui tulisannya, Risky menjelaskan bahwa di dalam tujuan Indonesia untuk menjadi negara maritim dan juga tujuan untuk menjadi poros maritim dunia, terdapat beberapa aspek yang layak dijadikan atensi pihak instansi pemerintahan Indonesia, seperti pemahaman perbatasan wilayah kelautan, pengembangan potensi maritim, mampu mencegah penangkapan ikan secara ilegal, atau pun mengatasi kejahatan transnasional lainnya. Kemudian, kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok ini dituangkan ke dalam tiga sektor penting yang perlu diubah. Pertama, adanya kesamaan tujuan, di mana Presiden Joko Widodo ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, dan Presiden Xi Jinping tengah membangun jalur sutra maritim baru. Kedua, kerja sama di sektor pengelolaan stabilisasi wilayah, yakni terkait dengan Laut China Selatan. Ketiga, kerja sama untuk meningkatkan hubungan antar-warga di antara kedua negara. Kerja sama yang mana terjadi diantara Indonesia dengan Tiongkok merujuk pada seluruh poin di visi poros maritim dunia maka bisa diambil simpulan bahwasanya kerja sama tersebut secara eksplisit mendukung visi Indonesia menjadi poros maritim dunia

¹⁷ Selly Lidiana, 2018, *Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Tiongkok Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Era Joko Widodo*, Malang, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

¹⁸ Risky Amalia, 2018, *Kerja Sama Maritim Indonesia-Tiongkok Menuju Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, vol. 6, no. 3, hal. 1271-1280.

meskipun keseluruhan kerja samanya belum terealisasikan. Metodologi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis deskriptif analisis. Peneliti juga menggunakan beberapa konsep untuk mendukung penelitiannya, yang di antara lain adalah kerja sama bilateral, dan konsep *seapower*.

Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok. Yang membedakan tulisan Rizky dengan tulisan penulis adalah bidang yang ingin diteliti, di mana Rizky membahas bagaimana kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok ini dapat berpengaruh kepada tujuan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sementara tulisan penulis berfokus kepada kepentingan nasional Indonesia di dalam menjalankan kerja sama peningkatan maritim dengan Tiongkok.

Tinjauan pustaka yang keenam berjudul **“Kerja sama Indonesia – Thailand Dalam Memberantas *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing* Di Perairan Indonesia”** yang ditulis oleh M. Alvin Rikzan.¹⁹ Penelitian ini melihat bagaimana Indonesia dan Thailand melakukan kerja sama dalam memberantas *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* di perairan Indonesia. Penelitian ini menganalisis kerja sama antara kedua negara dengan menggunakan Teori liberalisme dan kerja sama internasional. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data kepustakaan. Tujuan penelitian berikut yakni guna menegaskan adanya kerja sama yangmana terjalin diantara Indonesia dengan Thailand perihal penanganan IUU *fishing*. Terdapat dampak negatif timbul disebabkan adanya kegiatan IUU *fishing* sehingga pada penelitian berikut memfokuskan pada kawasan Indonesia. Wujud kerugiannya yakni di sektor perkonomian, politik, sosial hingga lingkungan, indonesia ialah wujud negara kepulauan yangmana termasuk paling besar di lingkup mendunia, hal tersebut menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia terkait penjagaan menjaga keamanan di kawasan perairan-nya dari tindakan IUU *fishing* yang marak muncul. Peran IUU *fishing* di Indonesia jelas krusial, sebab mayoritas kawasan perbatasan diantara Indonesia dengan negara tetangga ialah laut juga penjagaan kawasan perbatasan dinilai lemah sebab minimnya personil serta peralatan militer mumpuni..

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo muncul kebijaka baru yangmana fokus pada sektor maritim sehingga hal tersebut menguatkan poros maritim Indonesia, dimana IUU *fishing* dijadikan ancaman berbahaya bagi lingkup kedaulatan Indonesia. Thailand sebagai negara tetangga Indonesia mempunyai peran esensi akan munculnya IUU *fishing* di Indonesia, sebab Indonesia merupakan

¹⁹Muhammad, A. R., “KERJASAMA INDONESIA–THAILAND DALAM MEMBERANTAS *ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA” (Diponegoro University, 2018), <http://eprints.undip.ac.id/75647/#:~:text=Dalam%20penanganan%20IUU%20fishing%20Indonesi,a%20memerlukan%20kerja%20sama,media%20internet%20berupa%20situs-situs%20resmi%20pemerintah%20yang%20kompeten.>

fishing ground yang mana bisa Thailand memanfaatkan untuk melaksanakan penangkapan ikan. Hal tersebut dinilai krusial bagi Thailand, sebab Thailand ialah negara eksportir terbesar di Asia Tenggara sert paling besar di dunia pada sektor ekspor makanan lautnya.

Penelitian ini memiliki kelebihan karena memberikan gambaran yang luas tentang masalah IUU *fishing* yang dihadapi oleh Indonesia dan Thailand serta upaya yang dilakukan kedua negara untuk menyelesaikannya. Selain itu, penelitian ini memberikan panduan teori dan praktik bagi pembuat kebijakan Indonesia dan Thailand untuk membangun strategi kerja sama keamanan maritim yang lebih baik. Kekurangan dalam penelitian ini karena tidak memberikan analisis mendalam tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kerja sama Indonesia dan Thailand dalam memberantas IUU *fishing*. Selain itu, penelitian ini tidak memberikan saran praktis dan konkret untuk meningkatkan kerja sama keamanan maritim kedua negara.

Tinjauan pustaka yang ketujuh berjudul **“Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia di Indo-Pasifik sebagai Respon Perubahan Visi Tiongkok dan Implementasi *Grand Strategy and Sea Power* di Asia-Pasifik”** ditulis Maria Octa S.²⁰ Penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif eksplanatif serta menggunakan konsep keamanan internasional. Kesimpulan dari penelitian ini membahas mengenai kerja sama keamanan maritim diantara Indonesia dan Australia di Indo-Pasifik menjadi respons terhadap berubahnya visi Tiongkok serta implementasi *grand strategy and sea power* di Asia-Pasifik. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Tiongkok memiliki proyeksi untuk menjadi *sea power state* dengan menawarkan kerja sama serta pertolongan pembangunan berwujud *Belt and Road Initiative*, melaksanakan modernisasi militer, serta peningkatan kegiatan angkatan laut miliknya di Laut Cina Selatan. Kebijakan ini memunculkan ancaman bagi Indonesia serta Australia yang mana selanjutnya diberkan reaksi kedua negara melalui mengintensifkan kerja sama keamanan maritim yakni munculnya *Joint Declaration on Maritime Security* pada 2017. Kerja sama tersebut dimaksudn guna memaksimalkan kapasitas angkatan laut kedua negara ketika terjadi ancaman Tiongkok dan menjamin kepentingan nasional kedua negara di Indo-Pasifik.

Penelitian tersebut memiliki kelebihan karena memberikan gambaran yang komprehensif tentang masalah IUU *fishing* yang dihadapi oleh Indonesia dan Australia serta upaya yang dilakukan kedua negara untuk menyelesaikannya. Selain itu, penelitian ini memberikan panduan teori dan praktik bagi pembuat kebijakan Indonesia dan Australia guna menciptakan strategi kerja sama keamanan maritim

²⁰Maria, O. P., “Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia di Indo-Pasifik sebagai Respon Perubahan Visi Tiongkok dan Implementasi *Grand Strategy and Sea Power* di Asia-Pasifik” (Universitas Kristen Satya Wacana, 2020), <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/25391>.

secara optimal. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu tidak memberikan analisis mendalam tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kerja sama Indonesia dan Australia dalam memberantas IUU *fishing*. Selain itu, penelitian ini tidak memberikan saran praktis dan konkret untuk meningkatkan kerja sama keamanan maritim kedua negara.

Tinjauan pustaka yang kedelapan berjudul **“Implementasi *Act East Policy* India Dalam Kerja sama Keamanan Maritim India Dan Indonesia Periode 2015-2018”** yang ditulis oleh Suci Setia Dewi.²¹ Penelitian ini membahas mengenai implementasi *Act East Policy* India dalam kerja sama keamanan maritim India dan Indonesia periode 2015-2018. Penelitian berikut memanfaatkan konsep kebijakan luar negeri serta *Balance of Threat* melalui metode penelitian kualitatif juga pendekatan deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menjelaskan berkembangnya konsep kawasan Indo-Pasifik yangmana dilatarbelakangi adanya daya saing diantara Amerika Serikat dan Tiongkok yangmana dipandang menjadi wujud ancaman bagi stabilitas serta kepentingan nasional negara di kawasan terdekat. Indonesia dan India, keduanya memakai serta menguatkan kapabilitas maritim menjadi kekuatan geopolitik mereka lewat wujud kerjasama pertahanan menjadi aspek krusial penunjang posisi tawarnya di kawasan.

Kesimpulan pada penelitian berikut bahwasanya India memosisikan Indonesia menjadi pilar utama implementasi *Act East Policy* khususnya di sektor keamanan maritim sebab adanya kesamaan latar belakang historis, nilai strategis kemaritiman serta munculnya keselarasan akan visi Poros Maritim Dunia, maka hal tersebut dijadikan penyokong kerjasama keamanan maritim juga wujud *balancing* ketika membendung dampak agresivitas Tiongkok. Implementasi *Act East Policy* India melalui peningkatan kerja sama keamanan maritim menegaskan posisi India supaya di pertimbangkan pada kawasan regional perihal memajukan keseimbangan, perdamaian, juga mewujudkan stabilitas kawasan melalui Indonesia menjadi negara pemilik posisi sentral di Asia Tenggara juga kawasan Indo-Pasifik.

Penelitian ini memiliki kelebihan bahwa penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan Indonesia-India dalam konteks kerja sama keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini juga memberikan pandangan teoritis dan praktis bagi pembuat kebijakan Indonesia dan India dalam merumuskan strategi kerja sama keamanan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan keamanan maritim di Asia. Kekurangan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian ini kurang memberikan analisis mendalam tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kerja sama keamanan maritim Indonesia-India. Penelitian ini juga kurang memberikan rekomendasi yang konkret

²¹Dewi, S. S., “Implementasi *Act East Policy* India Dalam Kerjasama Keamanan Maritim India Dan Indonesia Periode 2015-2018” (UIN Jakarta, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/49464>.

dan operasional bagi kedua negara dalam meningkatkan kerja sama keamanan maritim mereka.

Selanjutnya, tinjauan pustaka yang kesembilan berjudul *“Security Cooperation between China and Indonesia to Address Maritime Security Threats”* ditulis oleh Yulianova Lestari, Georges Lohalo dkk.²² Jurnal ini menunjukkan bahwa Tiongkok dan Indonesia menghadapi tantangan keamanan maritim yang sama di Asia. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis serta menggunakan teori kerja sama keamanan untuk menjelaskan hubungan Tiongkok-Indonesia dalam konteks ancaman keamanan maritim, seperti sengketa perbatasan laut, pembajakan laut, terorisme maritim, pencemaran laut, dan perubahan iklim. Penelitian ini berfokus pada kerja sama keamanan antara Tiongkok dan Indonesia untuk mengatasi ancaman keamanan maritim di Asia. Selain itu, penelitian ini menganalisis kondisi kerja sama keamanan Tiongkok - Indonesia saat ini, yang mencakup kerja sama bilateral, multilateral, dan regional dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, dan militer. Penelitian ini mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama keamanan antara kedua negara, khususnya dalam menangkal ancaman keamanan maritim di Asia.

Penelitian ini memiliki kelebihan karena memberikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan Tiongkok-Indonesia dalam konteks kerja sama keamanan maritim di Asia. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif teoritis dan praktis tentang bagaimana pembuat kebijakan Tiongkok dan Indonesia dapat membuat strategi kerja sama keamanan yang lebih baik untuk mengatasi tantangan keamanan maritim di Asia. Kekurangan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini kurang menggunakan data primer. Selain itu, penelitian ini tidak memberikan studi kasus empiris yang spesifik untuk menunjukkan contoh kerja sama keamanan Tiongkok-Indonesia dalam menangani ancaman keamanan maritim. Selain itu, penelitian ini tidak memberikan analisis komparatif dengan negara-negara lain di Asia yang juga terlibat dalam kerja sama keamanan maritim, seperti AS, Jepang, India, atau ASEAN.

1.5.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Judul & Nama Peneliti	Jenis Penelitian & Alat Analisa	Hasil
1.	Kepentingan Indonesia dalam Kerja Sama Maritim Indonesia-	Metode Eksplanatif, Teknik Analisa Kualitatif,	Skripsi berikut membahas terkait Indonesia yang merupakan negara maritim dengan visi

²²Lestari, Y. dan Lohalo, G., “Security Cooperation between China and Indonesia to Address Maritime Security Threats,” *Open Journal of Political Science* 12 (2022), <https://doi.org/10.4236/ojps.2022.124030>.

	<p>Japan Maritime Forum (IJMF) dengan Jepang</p> <p>Oleh: Reza Fahlevi Al Ayubi, Universitas Muhammadiyah Malang (Skripsi)</p>	<p>Konsep: Kerja Sama Internasional dan Kepentingan Nasional.</p>	<p>pemerintahan menjadi Poros Maritim Dunia pada era pemerintahan Joko Widodo. Ketika mewujudkan visi tersebut, salah satu caranya adalah dengan melakukan kerja sama maritim dengan Jepang. Alasan Indonesia menjalin kerja sama dengan Jepang karena merupakan negara maritim dan sebagai salah satu cara untuk mempererat persahabatan kedua negara yang sudah lama terjalin, dan kerja sama ini merupakan yang pertama kali dilakukan kedua negara di bidang maritim. Dalam perkembangannya, Indonesia dan Jepang melakukan kerja sama maritim dengan menandatangani Nota Kerja sama pembentukan Indonesia-Japan Maritime Forum (IJMF).</p>
2.	<p>Kerja Sama Indonesia Australia Bidang Maritim (Maritime Cooperation) Tahun 2017-2018</p> <p>Oleh : Rahmania Kamarudin, Universitas Muhammadiyah Malang (Skripsi)</p>	<p>Metode Deskriptif, Teknik Analisa Kualitatif, Konsep : Kerja sama Internasional & Keamanan Maritim</p>	<p>Skripsi berikut membahas perihal kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia di sektor keamanan. Letak negara saling berdekatan menyebabkan terjadinya hubungan bilateral kedua negara tersebut dengan tujuan untuk menciptakan keamanan maritim dari segala kejahatan transnasional di daerah perbatasan atau yang dikenal dengan nama <i>Maritime Cooperation</i>. Penelitian ini juga memiliki batas waktu yaitu awal tahun 2017-2018 yang selaras dengan dibuatnya perjanjian kerja sama tersebut.</p>

3.	<p>Pengaruh Kompleksitas Ancaman Keamanan Maritim Terhadap Penguatan Kebijakan Maritim Indonesia Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo</p> <p>Oleh: Amaliya Mulyono, Universitas Muhammadiyah Malang (Skripsi)</p>	<p>Metode Deskriptif, Teknik Analisa Kualitatif, Konsep: keamanan maritim dan teori neo-realisme defensif.</p>	<p>Skripsi ini membahas mengenai ancaman maritim Indonesia, landasan kebijakan keamanan maritim Indonesia serta alasan Indonesia memperkuat keamanan maritim pada masa pemerintahan Joko Widodo. Sumber daya alam maritim yang melimpah mengundang kapal penangkapan asing melintasi wilayah Indonesia sehingga muncul kejahatan maritim. Keamanan maritim Indonesia diperkuat dengan menggunakan instrumen militer dan kerja sama agar terhindar dari ancaman tradisional dan non-tradisional.</p>
4.	<p>Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan Tiongkok Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Era Joko Widodo</p> <p>Oleh : Selly Lidiana, Universitas Muhammadiyah Malang (Skripsi)</p>	<p>Metode Eksplantif, teknik analisa Kualitatif, Konsep : Kepentingan Nasional & Kerjasama Bilateral</p>	<p>Skripsi berikut mengkaji terkait inisiatif Indonesia untuk melaksanakan kerja sama bersama Tiongkok di sektor pembangunan pelabuhan era Presiden Joko Widodo. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai visi sebagai poros maritim dunia. Untuk mewujudkannya, Indonesia melakukan kerja sama dengan Tiongkok sebagai acuan karena dianggap negaranya lebih maju. Adapun beberapa kepentingan Indonesia dalam melakukan kerja sama dengan Tiongkok antara lain : 1) peningkatan keamanan serta pertahanan Indonesia (<i>core values</i>); 2) peningkatan di sektor perekonomian (<i>middle-range objective</i>); 3) kepentingan akan</p>

			penjagaan keamanan perdamaian dunia (<i>long-range objective</i>).
5.	<p>Kerja Sama Maritim Indonesia-Tiongkok Menuju Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia</p> <p>Oleh : Rizky Amalia, Universitas Mulawarman (Jurnal)</p>	<p>Metode Deskriptif Analisis, Teknik Kualitatif, Konsep: Kerja Sama Bilateral & <i>Sea Power</i>.</p>	<p>Jurnal ini meneliti bahwa di dalam tujuan Indonesia untuk menjadi negara maritim dan juga tujuan untuk menjadi poros maritim dunia, terdapat beberapa poin yang mana hendaknya didikan atensi pemerintahan Indonesia, seperti pemahaman batasan kawasan laut, pengemabngan potensi maritim, mampu mencegah penangkapan ikan secara ilegal, atau pun mengatasi kejahatan transnasional lainnya. Kemudian, kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok ini dituangkan ke dalam tiga sektor penting yang perlu diubah. Pertama, adanya kesamaan tujuan, di mana Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia menjadi poros maritim, dan Presiden Xi Jinping tengah melalui pembangunan jalur sutra maritim baru. Kedua, kerja sama pada pengelolaan stabilitas kawasan, terkait dengan Laut China Selatan. Ketiga, kerja sama untuk meningkatkan hubungan antar-warga di antara kedua negara. Kerja sama yangmana terjalin diantar Indonesia serta Tiongkok merujuk pada seluruh visi poros maritim dunia maka bisa diambil simpulan bahwasanya kerja sama tersebut menyokong visi Indonesia menjadi poros maritim dunia meski seluruh kerja samanya belum terealisasikan.</p>

<p>6.</p>	<p>Kerjasama Indonesia – Thailand Dalam Memberantas <i>Illegal, Unreported And Unregulated Fishing</i> Di Perairan Indonesia</p> <p>Oleh : M. Alvin Rikzan</p> <p>Universitas Diponegoro</p> <p>(Skripsi)</p>	<p>Metode Deskriptif, Teknik Analisa Kualitatif, Konsep: Kerja sama internasional dan Teori liberalisme</p>	<p>Skripsi ini melihat bagaimana Indonesia dan Thailand melakukan kerja sama dalam memberantas <i>illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing</i> di perairan Indonesia. Potensi IUU <i>fishing</i> di Indonesia krusial, sebab mayoritas kawasan perbatasan diantara Indonesia dengan negara tetangga yakni laut juga sistematika penjagaan kawasan perbatasan tergolong lemah sebab minimnya personil serta peralatan iliter kurang mumpuni.</p> <p>Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo muncul kebijakan berujuk pada sektor maritim serta menguatkan poros maritim Indonesia, yakni IUU <i>fishing</i> dijadikan ancaman berbahaya bagi kedaulatan Indonesia.</p>
<p>7.</p>	<p>Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia di Indo-Pasifik sebagai Respon Perubahan Visi Tiongkok dan Implementasi <i>Grand Strategy and Sea Power</i> di Asia-Pasifik</p> <p>Oleh : Maria Octa</p> <p>Universitas Kristen Satya Wacana</p> <p>(Skripsi)</p>	<p>Metode Eksplanatif, Teknik Analisa Kualitatif, Konsep: Keamanan Internasional</p>	<p>penelitian berikut membahas mengenai kerja sama keamanan maritim antara Indonesia dengan Australia di Indo-Pasifik menjadi respons terhadap berubahnya visi Tiongkok dan implementasi <i>grand strategy and sea power</i> di Asia-Pasifik. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Tiongkok memiliki proyeksi untuk menjadi <i>sea power state</i> dengan menawarkan kerja sama serta pertolongan pembangunan berwujud <i>Belt and Road Initiative</i>, melaksanakan modernisasi militer, serta peningkatan kegiatan angkatan lautnya di Laut Cina Selatan. Kebijakan ini memunculkan ancaman bagi Indonesia serta</p>

			Australia sehingga direspons kedua negara melalui intensif adanya kerjasama keamanan maritim yakni <i>Joint Declaration on Maritime Security</i> pada 2017. Kerja sama dimaksudkan guna peningkatan kapasitas angkatan laut kedua negara guna menghadapi ancaman Tiongkok serta penjaminan kepentingan nasional kedua negara di Indo-Pasifik.
8.	<p>Implementasi <i>Act East Policy</i> India Dalam Kerja sama Keamanan Maritim India Dan Indonesia Periode 2015-2018</p> <p>Oleh : Suci Setia Dewi</p> <p>UIN Jakarta</p> <p>(Skripsi)</p>	Metode Deskriptif, Teknik Analisa Kualitatif, Konsep: Kebijakan Luar Negeri dan <i>Balance of Threat</i>	Skripsi ini membahas mengenai implementasi <i>Act East Policy</i> India dalam kerja sama keamanan maritim India dan Indonesia periode 2015-2018. Dalam penelitian ini menjelaskan perkembangan konsep wilayah Indo-Pasifik yang dilatarbelakangi oleh persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok yang dipersepsikan sebagai ancaman bagi kestabilan dan kepentingan nasional negara-negara di kawasan terkait. India memposisikan Indonesia menjadi pilar utama pada implementasi <i>Act East Policy</i> utamanya di sektor keamanan maritim sebab kesamaan latar belakang historis, nilai strategis kemaritiman, serta adanya keselarasan dengan visi Poros Maritim Dunia, maka hal tersebut bisa menyokong kerja sama keamanan maritim juga berwujud <i>balancing</i> dalam membendung dampak agresivitas Tiongkok.
9.	<p><i>Security Cooperation between China and</i></p>	Metode Deskriptif, Teknik Analisa	Penelitian berikut berfokus pada kerja sama keamanan antara

	<p><i>Indonesia to Address Maritime Security Threats</i></p> <p>Oleh : Yulianova Lestari, Georges Lohalo dkk</p> <p>(Jurnal)</p>	<p>Kualitatif, Konsep: Kerja sama keamanan</p>	<p>Tiongkok dan Indonesia untuk mengatasi ancaman keamanan maritim di Asia. Selain itu, penelitian ini menganalisis kondisi kerja sama keamanan Tiongkok - Indonesia saat ini. Penelitian ini mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan kerja sama keamanan antara kedua negara, khususnya dalam menangkal ancaman keamanan maritim di Asia.</p>
--	---	--	---

1.6 Landasan Konseptual

Landasan konseptual dinilai esensial pada suatu penelitian karena dapat membantu penulisan secara fokus dan sistematis. Adapun beberapa konsep dan teori yang penulis gunakan antara lain:

1.6.1 Konsep Keamanan Maritim

Dalam studi hubungan internasional, keamanan maritim adalah salah satu konsep yang baru dengan definisi yang kompleks. Keamanan maritim adalah suatu kolaborasi tindakan preventif serta responsif dengan tujuan guna mengamankan kawasan maritim dari ancaman juga kejahatan yang mana dilaksanakan sengaja. Menurut Feldt, Roell, dan Thiele, definisi keamanan maritim berbeda dengan keselamatan maritim.²³ Keamanan maritim mengarah pada tindakan pelanggaran hukum, sedangkan keselamatan maritim mengacu pada perlindungan wilayah dari ancaman yang tak disengaja. Kedua perbedaan pengertian tersebut ditujukan guna merencanakan sistematisa tindakan pencegahan juga penanganan ancaman baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Pendekatan kedua hal tersebut juga tak sama. Keamanan maritim memiliki pendekatan sistem hukum ketat, terdapat personel pengamanan juga hukuman yang diberikan kepada pelanggar tindak kejahatan maritim. Sedangkan keselamatan maritim memiliki pendekatan pada

²³Lutz Feldt, Peter Roell, & Ralph D Thiele, 2013, *Maritime Security - Perspective for a Comprehensive Approach*, ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security, hal. 1-25.

responsif dalam menghadapi segala situasi yang membahayakan dengan keadaan siap.²⁴

Barry Buzan menjelaskan bahwa ada dua jenis pemikiran tentang keamanan maritim, yaitu kerangka tradisional dan kerangka non-tradisional. Kerangka tradisional memiliki penekanan pada kepentingan keamanan yang membahayakan keutuhan dan kedaulatan wilayah maritim serta cenderung membatasi konsep keamanan (*de-securitization*). Sementara kerangka non-tradisional memiliki penekanan pada kepentingan keamanan pelaku bukanlah negara atau non-state actors serta cenderung memperluas konsep keamanan (*securitization*). Kerangka non-tradisional tidak hanya terfokus pada kedaulatan militer saja tetapi untuk menjamin keamanan warga negaranya.

Selain itu, keamanan maritim jika dilihat dari segi konseptual memiliki dua perspektif yaitu perspektif keamanan tradisional dan perspektif keamanan non-tradisional. Perspektif keamanan tradisional berpandangan pada negara yang menekankan bidang kedaulatan negara atas wilayah maritim atau lautnya (*state centric*) serta bersifat militeristik. Dalam keamanan tradisional menggunakan konsep sea power yang artinya adalah peningkatan kekuatan angkatan laut untuk melindungi wilayah laut dan jalur perdagangannya. Adapun aktor yang memberikan ancaman yang terdapat dalam perspektif keamanan tradisional adalah negara lain.²⁵ Contohnya, seperti sengketa wilayah perairan, melakukan klaim wilayah maritim Indonesia oleh negara lain serta melakukan kegiatan pelanggaran batas-batas teritorial wilayah maritim Indonesia oleh negara lain.

Sedangkan perspektif keamanan maritim non-tradisional memiliki pandangan yang mencakup pada empat aspek utama yaitu keamanan manusia (*national security*), keamanan perekonomian (*economy security*), keamanan nasional (*national security*) serta lingkungan maritim (*marine environment*). Keempat aspek hendaknya tercapai agar kondisi maritim Indonesia dalam keadaan aman juga kedamaian. Jika satu aspek terpenuhi maka bisa dikatakan keamanan hanya luaran saja dan belum bisa diatasi sampai ke akar permasalahannya.²⁶

Dalam jurnal yang berjudul "*What is maritime security?*" menurut Christian Bueger ancaman dalam keamanan maritim adalah sengketa diantara negara maritim, terorisme maritim, perompakan, perdagangan narkoba, *human trafficking*, narkoba, penyelundupan senjata, *illegal fishing*, kejahatan lingkungan atau kecelakaan maritim, dan juga bencana.²⁷

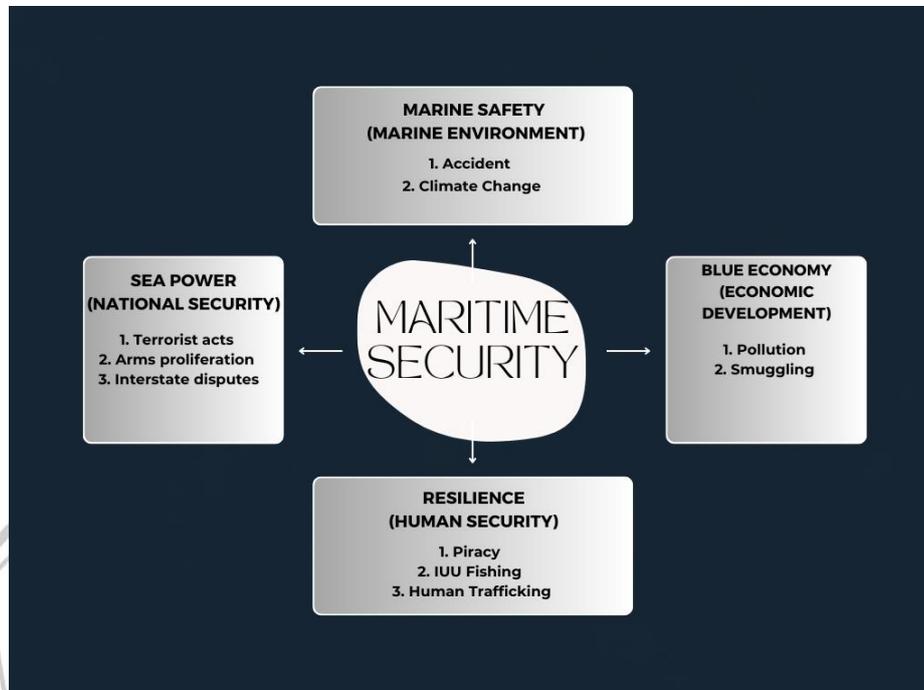
²⁴Ibid.

²⁵Giok, K. K., "Sea power as a strategic domain.," *Journal of the Singapore Armed Forces* 41, no. 3 (2014): 2-3.

²⁶Bueger, C., "What is maritime security?," *Marine Policy* 53 (2015), <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005>.

²⁷Ibid

Berikut adalah matriks keamanan maritim menurut Christian Bueger untuk menjelaskan ancaman keamanan maritim.



Berdasarkan konsep keamanan maritim, ancaman juga terbagi atas dua jenis yaitu ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional. Ancaman tradisional yang dimaksud yaitu kegiatan yang membahayakan kedaulatan wilayah maritim dan militer. Ancaman tradisional ini meliputi pengembangan senjata dan sengketa wilayah antar negara. Sedangkan ancaman non-tradisional yang dimaksud adalah kegiatan yang membahayakan wilayah maritim yang terfokus pada warga negara dan kegiatan ekonominya. Contoh ancaman non-tradisional antara lain pembajakan, perdagangan manusia, penyelundupan orang (imigran *illegal*), terorisme maritim, perampokan, radikalisme, IUU *Fishing*, serta pencemaran lingkungan laut.²⁸

Selanjutnya, terdapat 7 jenis ancaman non-tradisional yang tercantum pada laporan Sekretaris Jenderal PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) tahun 2008 terkait *Oceans and the Law of the Sea*, yakni : 1) *Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction* (tindakan menyelundupkan senjata serta senjata pemusnah massal); 2) *Illicit trafficking in narcotics* (tindakan menyelundupkan obat-obatan terlarang); 3) *Smuggling and trafficking of persons by sea* (tindakan menyelundupkan serta perdagangan manusia lewat laut) 4) *Intentional and unlawful damage to the marine environment* (tindakan merusak lingkungan laut secara sengaja); 5) *Piracy and armed robbery* (tindakan merampok serta memakai

²⁸Mangindaan, R., "Indonesia dan Keamanan Maritim: Apa Arti Pentingnya.," 2019, <https://pusjianhanmar.org/indonesia-dan-keamanan-maritim-apa-arti-pentingnya/>.

senjata); ; 6) *Terrorist acts* (tindakan - tindakan terorisme); 7) *IUU Fishing* (usaha perikanan ilegal, tak diatur serta tak dilaporkan).²⁹

Wilayah maritim erat kaitannya dengan wilayah internasional yang bersifat anarki. Hal ini dikarenakan adanya kepentingan negara serta kurangnya pengawasan terhadap kegiatan di laut terutama kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi maritim kebanyakan melakukan perdagangan global jalur laut serta pelayaran dan penangkapan ikan yang menjadi sektor industri yang menunjang pembangunan ekonomi negara. Selain itu nilai jual maritim Indonesia semakin meningkat dengan adanya evaluasi sumber daya maritim lainnya seperti penambangan dasar laut, sumber daya lepas pantai, energi fosil sentral serta pariwisata pesisir.³⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut, Indonesia merupakan negara kepulauan yang mayoritas ancamannya berasal dari bidang maritim. Maka dari itu, untuk membahas mengenai penelitian ini, menggunakan konsep keamanan maritim yang akan membantu penulis di dalam menjabarkan serta menganalisis kepentingan Indonesia ketika menjalankan kerja sama di bidang maritim dengan Republik Rakyat Tiongkok.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian mengenai “Kepentingan Indonesia dalam *Strengthening Maritime Cooperation* dengan Republik Rakyat Tiongkok” ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab secara rinci pertanyaan "bagaimana" sehingga penulis akan menjelaskan tentang kepentingan Indonesia saat melakukan hubungan kerja sama maritim dengan Republik Rakyat Tiongkok.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau kepustakaan. Studi literatur adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan berupa jurnal, artikel, laporan, e-book, serta sumber lainnya yang berasal dari internet. Selain itu sumber kepustakaan lainnya yang bersifat resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta data-data penelitian yang bersifat resmi.³¹

²⁹Mangindaan, R., “Indonesia dan Keamanan Maritim: Apa Arti Pentingnya.”

³⁰Christian Bueger, 2015, *What is Maritime Security*, Marine Policy, hal. 1-25.

³¹SilalahiUlber, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung, PT. Refika Aditama.

1.7.3 Teknik Analisa Data

Penelitian berikut memanfaatkan teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan simpulan. Pertama, reduksi data adalah teknik analisis data berfokus pada menggolongkan, mengarahkan, serta mengorganisir data sehingga mendapatkan suatu kesimpulan.

Kedua, penyajian data adalah teknik analisis data yang menyajikan hasil data yang telah direduksi berupa penjelasan yang diuraikan secara detail dalam bentuk paragraf dan dilengkapi dengan gambar, tabel serta grafik. Ketiga, penarikan kesimpulan adalah teknik analisis data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk kesimpulan. Biasanya disusun dari awalan yang bersifat umum kemudian menjadi khusus dan terperinci.³²

1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Waktu

Penelitian berikut membatasi waktu sangat luas maka penelitian fokus pada penentuan batasan waktu. Batasan waktu pada penelitian berikut yakni tahun 2021 yakni awal munculnya penandatanganan MoU diantar Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok dianggap menjadi kepentingan kedua negara perihal korelasinya kerja sama maritim.

b. Batasan Materi

Penelitian mempunyai batasan materi yang merujuk akan seluruh pemaparan terkait kerja sama diantara kedua negara di sektor maritim disesuaikan pada penetapan batasan waktu penelitian serta merujuk pada teori serta pemanfaatan konsep penulis.

1.8 Argumen Pokok

Berdasarkan telaah teori dan konseptual di atas, adapun indicator yang mendasar mengenai keamanan maritim ialah : 1) *Illicit trafficking in arms and weapons of massdestruction* (tindakan menyelundupkan senjata serta senjata pemusnah massal); 2) *Illicit trafficking in narcotics* (tindakan menyelundupkan obat-obatan terlarang); 3) *Smuggling and trafficking of persons by sea* (tindakan menyelundupkan serta perdagangan manusia lewat laut) 4) *Intentional and unlawful damage to the marine environment* (tindakan merusak lingkungan laut secara sengaja); 5) *Piracy and armed robbery* (tindakan merampok serta memakai senjata); ; 6) *Terrorist acts* (tindakan - tindakan terorisme); 7) *IUU Fishing* (usaha perikanan ilegal, tak diatur serta tak dilaporkan). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan didukung dengan konsep keamanan maritim serta

³²Monageng Mogalakwe, 2006, *The Use of Documentary Research Methods in Social Research*, African Sociological Review, hal. 1-15.

indikatornya. Maka penulis merumuskan hipotesis dalam penelitian ini, di mana kepentingan Indonesia dalam melakukan penguatan kerja sama dengan Tiongkok merupakan keinginan dan kesadaran pemerintah Indonesia untuk mengatasi ancaman keamanan di wilayah maritim untuk menciptakan keamanan dan keselamatan wilayah maritim sebagai wilayah kesatuan NKRI serta menjaga kelestarian dan potensi sumber daya laut.

1.9 Sistematika Penulisan

<p>BAB I</p> <p>Pendahuluan</p>	<p>1.1.Latar Belakang</p> <p>1.2. Rumusan Masalah</p> <p>1.3. Tujuan Penelitian</p> <p>1.4. Manfaat Penelitian</p> <p>1.4.1. Manfaat Akademis</p> <p>1.4.2. Manfaat Praktis</p> <p>1.5 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5.1. Tabel Penelitian Terdahulu</p> <p>1.6 Landasan Konseptual</p> <p>1.6.1. Keamanan Maritim</p> <p>1.7. Metodologi Penelitian</p> <p>1.7.1. Jenis Penelitian</p> <p>1.7.2. Teknik Pengumpulan Data</p> <p>1.7.3. Teknik Analisa Data</p> <p>1.7.4. Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.8. Argumen Penelitian</p> <p>1.9. Sistematika Penulisan</p>
<p>BAB II</p> <p>Kebijakan Maritim Indonesia</p>	<p>2.1 Kebijakan Wilayah Perairan Indonesia</p> <p>2.1.1. Kebijakan Wilayah Perairan Indonesia Era Orde Lama</p> <p>2.1.2. Kebijakan Wilayah Perairan Indonesia Era Orde Baru</p>

	<p>2.1.3. Kebijakan Wilayah Perairan Indonesia Era Reformasi</p> <p>2.2 Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia</p> <p>2.3 Kekuatan Maritim Tiongkok</p> <p>2.4 Kerjasama Indonesia – Tiongkok dalam Bidang Maritim</p>
<p>BAB III</p> <p>Tantangan Keamanan Wilayah Perairan Indonesia Pada Perairan</p>	<p>3.1 Ancaman Keamanan Maritim Tradisional</p> <p>3.1.1. Sengketa Wilayah</p> <p>3.2 Ancaman Keamanan Maritim Non-Tradisional</p> <p>3.2.1. <i>Piracy and armed robbery</i> (Perompakan dan perampokan bersenjata)</p> <p>3.2.2. <i>Terrorist acts</i> (tindakan - tindakan terorisme)</p> <p>3.2.3. <i>Illicit trafficking in arms and weapons of mass destruction</i> (penyelundupan senjata dan senjata pemusnah massal)</p> <p>3.2.4. <i>Illicit trafficking in narcotics</i> (penyelundupan obat-obatan terlarang)</p> <p>3.2.5. <i>Smuggling and trafficking of persons by sea</i> (penyelundupan dan perdagangan manusia lewat laut)</p> <p>3.2.6. <i>IUU Fishing</i></p> <p>3.2.7. <i>Intentional and unlawful damage to the marine environment</i> (pengerusakan terhadap lingkungan laut yang disengaja)</p>
<p>BAB IV</p> <p>Kepentingan Nasional Dalam Memperkuat Kerja Sama Dengan Tiongkok di Bidang Maritim</p>	<p>4.1 Kepentingan Nasional Indonesia di Sektor Maritim</p> <p>4.2 Kepentingan Indonesia dalam Kerja Sama Maritim dengan Tiongkok</p> <p>4.2.1. Kepentingan Menjaga Sumber Daya Kelautan</p> <p>4.2.2 Kepentingan Indonesia dalam Aspek Politik</p> <p>4.2.3 Kepentingan Indonesia dalam Aspek Sosial - Budaya</p> <p>4.2.4. Kepentingan Indonesia dalam Aspek Ekonomi</p>

	<p>4.2.5. Kepentingan Memerangi dan Mengatasi Ancaman Keamanan di Kawasan Maritim</p> <p>4.2.6. Kepentingan mengembangkan Sumber Daya Kelautan Indonesia</p>
<p>BAB V</p> <p>Penutup</p>	<p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>

